

**STRATEGI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUKTIKAN
TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE**Arisman Baene¹, Herlina Manullang²arisman.baene@student.uhn.ac.id¹, herlinamanullang@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nomensen Medan

Abstrak: Kemajuan teknologi membawa banyak kemudahan. Namun juga muncul tantangan baru, terutama dalam membuktikan tindak pidana judi online. Penelitian ini membahas strategi Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan tindak pidana perjudian online di Indonesia, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi yang menciptakan tantangan baru bagi penegakan hukum. Dalam konteks globalisasi, perjudian online semakin marak dan sulit diatur, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis mendalam terhadap alat bukti, baik konvensional maupun elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JPU menghadapi beban pembuktian yang tinggi serta kompleksitas kasus yang sering melibatkan jaringan internasional. Strategi yang diterapkan mencakup pengumpulan dan analisis bukti yang sistematis, penggunaan teknologi forensik, serta kerjasama lintas lembaga. JPU juga harus memahami unsur-unsur subjektif dan objektif dalam perjudian online untuk membuktikan kesalahan pelaku secara sah. Penegakan hukum yang tegas, diiringi dengan edukasi masyarakat mengenai dampak negatif perjudian online, sangat penting untuk menciptakan efek jera. Dengan demikian, strategi JPU yang adaptif dan inovatif menjadi kunci dalam menghadapi tantangan hukum yang muncul di era digital ini, demi perlindungan masyarakat dan integritas penegakan hukum.

Kata Kunci: Strategi, Jaksa, Pidana, Judi Online.

Abstract: Technological advances bring many conveniences. However, new challenges have also emerged, especially in proving criminal acts of online gambling. This research discusses the Public Prosecutor's strategy in prove criminal acts of online gambling in Indonesia, amidst the rapid development of information technology which creates new challenges for law enforcement. In the context of globalization, online gambling is increasingly widespread and difficult to regulate, so an effective legal approach is needed. The research method used is normative juridical, with in-depth analysis of evidence, both conventional and electronic. The research results show that prosecutors face a high burden of proof and the complexity of cases that often involve international networks. The strategies implemented include systematic evidence collection and analysis, use of forensic technology, and cross-agency collaboration. The prosecutor must also understand the subjective and objective elements in online gambling to legally prove the perpetrator's guilt. Strict law enforcement, accompanied by public education regarding the negative impacts of online gambling, is very important to create a deterrent effect. Thus, an adaptive and innovative prosecutor's strategy is key in facing the legal challenges that arise in this digital era, for the protection of society and the integrity of law enforcement.

Keywords: Strategy, Prosecutor, Crime, Online Gambling.

PENDAHULUAN

Pengaruh globalisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah gaya hidup masyarakat, menciptakan tatanan kehidupan baru, dan mendorong perubahan di berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Namun penggunaan sarana teknologi ini juga banyak menimbulkan penyimpangan yang merugikan banyak pihak. Seiring dengan perkembangan teknologi, bermunculan berbagai modus kejahatan baru, antara lain carding, hacking, penipuan, terorisme, perjudian, dan penyebaran informasi destruktif yang semuanya dimanfaatkan oleh penjahat berteknologi canggih. Di sisi lain, teknologi informasi dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum sebagai alat bantu dalam menjalankan tugasnya. Faktanya, pendekatan teknologi telah banyak memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai kasus. Teknologi elektronik ini berperan dalam proses pembuktian. Namun penerapan teknologi dalam pembuktian masih memerlukan penelitian lebih lanjut, terutama dalam konteks mekanisme hukum di Indonesia.

Perjudian merupakan aktivitas yang melibatkan taruhan, di mana pemain menentukan satu dari beberapa opsi, dan hanya salah satu yang akan menjadi pemenang. Pemain yang kalah akan menyerahkan taruhannya kepada pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan biasanya sudah disepakati sebelum permainan dimulai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan yang menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan, seperti permainan dadu atau kartu. Judi online merupakan salah satu bentuk perjudian yang dilakukan melalui media elektronik dengan internet sebagai sarana utamanya. Hal ini memungkinkan pemain untuk bertaruh dan bermain dari mana saja, menggunakan perangkat seperti komputer atau ponsel. Adanya perjudian online memudahkan akses, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kecanduan dan peraturan yang sulit diterapkan.

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, dijelaskan bahwa perjudian mencakup permainan di mana keuntungan bergantung pada faktor keberuntungan, meskipun ada elemen keterampilan dari pemain. Hal ini mencakup peraturan tentang keputusan dalam perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan antara peserta. Ketentuan ini membantu membedakan antara perjudian dan permainan yang sepenuhnya bergantung pada keterampilan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa judi online dapat menimbulkan dampak negatif yang serius di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengambil tindakan hukum, termasuk mengungkap pelaku perjudian online. Tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh perjudian online.

Terkait dengan kasus tindak pidana judi online melalui teknologi yang semakin sering terjadi, pembuktian menjadi aspek yang sangat penting pada pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian mencakup ketentuan yang memberikan panduan mengenai hal-hal apa saja yang diizinkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Selain itu, pembuktian juga mengatur alat-alat bukti yang sah digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan berdasarkan hukum dan keyakinan pribadi hakim. Oleh sebab itu, dalam persidangan, hakim tidak dapat bertindak sembarangan dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Kejaksaan sebagai penyidik dalam membuktikan suatu tindak pidana tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, terkait dengan judi online yang mana selalu berkaitan dengan elektronik KUHAP sendiri belum menyesuaikan pada perkembangan teknologi informasi, ini tentunya akan menimbulkan masalah baru. Oleh sebab itu perlu penyesuaian sistem pembuktian elektronik. Alat bukti merupakan salah satu kunci dan pedoman yang

diperbolehkan undang-undang untuk menentukan terdakwa salah atau tidak. Sehingga strategi dalam membuktikan tindak pidana perjudian online sangat dibutuhkan, mengingat perkembangan judi online yang pesat dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk mencegah penyebaran perjudian online dan melindungi masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik mengangkat judul “strategi jaksa penuntut umum membuktikan tindak pidana perjudian online”. Dengan pemahaman yang mendalam tentang apa saja langkah-langkah yang diambil oleh jaksa penuntut umum dalam membuktikan dan menganalisis bukti tindak pidana perjudian online, dan bagaimana strategi jaksa penuntut umum dalam menghadapi tantangan hukum dan teknis yang muncul dalam proses pembuktian kasus perjudian online.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang pokok, seperti teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan perpustakaan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode berpikir deduktif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan menganalisis aspek internal hukum positif yang menitikberatkan pada ruang lingkup konsepsi hukum, asas-asas hukum, dan kaidah hukum.

Proses identifikasi dan inventarisasi bahan hukum dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa semua sumber yang relevan telah tercakup dalam analisis. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis kualitatif mendalam terhadap bahan hukum yang terkumpul. Analisis ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasi status quo hukum terkini dan memberikan wawasan mengenai penerapan dan interpretasi norma hukum yang relevan dalam konteks yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian

Pembuktian merupakan elemen yang sangat diperhatikan dalam hukum pidana mengingat yang dicari adalah kebenaran materil. Menurut Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa “Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menetapkan prinsip yang dianut adalah sistem pembuktian yang bersifat negatif (*negatief wettelijk*). Prinsip ini menciptakan keseimbangan antara keyakinan hakim (*conviction in time*) dan tahap-tahap pembuktian yang diatur oleh undang-undang, termasuk alat bukti yang telah ditentukan.

Kekuatan Pembuktian dalam Perjudian Online menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur tentang larangan terkait informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Dalam Pasal 27 Ayat (1): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal terkait.

Dengan kata lain, pembuktian adalah langkah-langkah hukum yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan dalam sebuah perkara, termasuk dalam hal ini membuktikan bahwa suatu perbuatan atau tindakan yang didakwakan kepada seorang terdakwa benar-benar terjadi sesuai dengan fakta yang ada. Alat bukti yang diajukan selama

proses pembuktian harus mengikuti prosedur yang diatur dalam hukum acara yang berlaku, dan dalam hal ini, hukum acara pidana, yang memastikan bahwa pembuktian dilakukan secara sah dan adil.

Dalam konteks transaksi elektronik, seperti yang terkait dengan perjudian online, proses pembuktian akan melibatkan alat bukti yang bersumber dari sistem elektronik, yang harus dihadirkan dalam proses persidangan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum acara dan hukum terkait transaksi elektronik, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Bentuk alat bukti yang diakui sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti indikatif, dan keterangan terdakwa. Dengan kemajuan teknologi dan informasi, kini terjadi perkembangan dalam bentuk alat bukti yang meliputi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dikenal dengan alat bukti elektronik.

Bukti elektronik adalah data yang disimpan dan/atau dapat dipindahkan menggunakan perangkat elektronik, sistem komunikasi, dan jaringan. Data ini berfungsi untuk membuktikan adanya perbuatan pidana. Setelah diberlakukannya UU ITE, terdapat pengaturan dan ketentuan baru mengenai bentuk alat bukti elektronik.

Pembuktian adalah suatu ketentuan yang memuat pedoman mengenai cara-cara yang diakui undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Selain itu, pembuktian juga mengatur tentang alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahannya. Sedangkan membuktikan mengandung beberapa pengertian sebagai berikut :

- a. Membuktikan dalam arti logis berarti memberikan kepastian mutlak yang berlaku untuk semua orang dan tidak memperbolehkan adanya pembuktian lain.
- b. Pembuktian secara konvensional memberikan suatu kepastian, tetapi bukan kepastian mutlak; melainkan kepastian relatif atau komparatif, dengan tingkatan sebagai berikut:
 1. Kepastian yang bersifat intuitif, berdasarkan perasaan (conviction intime)
 2. Kepastian yang bersifat rasional, berdasarkan pertimbangan akal (conviction raisonnee).
- c. Dalam konteks keterangan yuridis, membuktikan berarti menggunakan alat bukti yang memberikan kepastian kepada hakim mengenai kebenaran yang sebenarnya terjadi.

B. Langkah-langkah Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengumpulkan dan Menganalisis Bukti

Perjudian di Indonesia adalah suatu tindakan kriminal yang dapat dikenakan sanksi hukum. Secara fundamental, perjudian bertentangan dengan ajaran agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai Pancasila, serta berpotensi membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun demikian, saat ini praktik perjudian dalam berbagai bentuk masih banyak dijumpai di masyarakat. Perjudian melibatkan taruhan secara sengaja, di mana seseorang mempertaruhkan nilai atau sesuatu yang dianggap berharga, dengan menyadari risiko dan harapan tertentu terkait dengan peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian yang hasilnya tidak pasti.

Beberapa tahun terakhir, perjudian online semakin marak di masyarakat, sehingga Penuntut Umum melalui Arahan Jaksa Agung menerapkan langkah-langkah khusus dengan merujuk pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Banyak kasus perjudian online yang masuk ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terlebih dahulu ditelaah dan diteliti oleh Jaksa Peneliti.

Jaksa sebagai penuntut umum melakukan pemeriksaan berkas perkara terlebih dahulu dengan meneliti apakah semua unsur yang berkaitan dengan perjudian online telah terpenuhi.

1. Unsur setiap orang yang dimaksud di sini mencakup semua individu yang berpotensi terlibat dalam perbuatan perjudian online.

2. Unsur yang dijelaskan untuk mencari fakta dalam perjudian online ini meliputi tindakan seseorang yang mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat konten perjudian dapat diakses secara elektronik. Unsur ini dijelaskan sebagai berikut: mendistribusikan berarti mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

Penuntut Umum dalam setiap kasus perjudian online pertama-tama memperhatikan apakah unsur-unsur terkait perjudian online telah terpenuhi. Unsur-unsur ini sangat penting dalam kasus perjudian online yang tergolong tindak pidana khusus. Oleh karena itu, proses penelaahan suatu kasus perjudian online harus dilakukan dengan cermat, memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

- a. Jenis-jenis informasi elektronik yang mengandung konten perjudian

Alat bukti dalam kasus perjudian online diperoleh dari berbagai sumber, termasuk iklan yang dapat menjadi indikasi adanya perjudian online. Selain iklan, bukti lainnya yang digunakan adalah situs webnya. Situs dalam konteks perjudian online adalah kumpulan konten yang biasanya terdiri dari beberapa halaman, dikelompokkan dalam domain yang sama, dan memuat informasi terkait judi.

Berbicara tentang tindak pidana judi online tidak lepas dari bukti elektronik, Pembuktian terhadap barang bukti elektronik tidak dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan peralatan komputer sebagai bukti. Sebelum itu, jaksa penuntut umum perlu dilakukan penelitian dan analisis, serta didukung oleh alat bukti lain. Setelah itu, dapat disimpulkan bahwa barang bukti elektronik tersebut relevan dan digunakan dalam proses pembuktian. Komponen atau peralatan komputer yang dapat diklasifikasikan sebagai barang bukti benda bergerak dalam konteks alat bukti (Pasal 184 KUHAP) disebut sebagai alat bukti petunjuk. Sementara itu, keterangan dari ahli yang menguasai peralatan elektronik dan perangkat komputer disebut sebagai keterangan ahli, juga dalam konteks alat bukti (Pasal 184 KUHAP).

- b. Penyitaan server

Penyitaan server pengelola judi online merupakan langkah penting dalam penegakan hukum terhadap praktik perjudian di internet. Dalam konteks ini, forensik digital digunakan untuk mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa pelaku telah mengakses situs judi, yang dapat membantu membuktikan pola perilaku perjudian. Penyitaan server memungkinkan penyidik untuk melakukan analisis forensik terhadap data yang tersimpan. Ini mencakup informasi mengenai seberapa sering pelaku mengakses situs judi dan transaksi rekening yang dilakukan, yang dapat menjadi bukti kuat dalam persidangan.

- c. Digital Forensik

Penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi sering kali memerlukan forensik. Forensik adalah proses investigasi untuk menetapkan fakta-fakta yang berhubungan dengan kejadian kriminal dan masalah hukum lainnya. Forensik digital adalah bagian dari ilmu forensik yang fokus pada penemuan dan investigasi data yang ada di perangkat digital seperti komputer, ponsel, tablet, perangkat PDA, perangkat jaringan, penyimpanan, dan sejenisnya. Dalam tindak pidana judi Online digital forensik merupakan elemen yang sangat penting dalam menguji keabsahan barang bukti. Merespon hal ini jaksa penuntut umum melakukan uji forensik digital dalam persidangan, ini menekankan pada keabsahan bukti digital tersebut. Hasil uji forensik digital ini bertujuan untuk mengidentifikasi objek (bukti digital), menemukan pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana, serta merekonstruksi peristiwa pidana yang terjadi. Hasil uji tersebut akan mendukung bukti digital sebagai alat bukti maupun barang bukti. Bukti digital yang telah melalui proses forensik digital lebih dapat dipertanggungjawabkan, karena melibatkan penerapan ilmu pengetahuan dan analisis yang mendalam. Di persidangan, hasil uji forensik

digital dapat disajikan sebagai alat bukti surat dan keterangan. Dengan demikian, pengajuan hasil tersebut dapat meningkatkan keyakinan hakim terhadap suatu peristiwa pidana.

C. Strategi Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuktikan Tindak Pidana Judi Online

Strategi Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan tindak pidana perjudian online dapat melibatkan beberapa pendekatan baik yang berkaitan dengan perbuatan itu sendiri maupun bukti yang mendukung terjadinya tindak pidana. Berikut beberapa strategi yang bisa digunakan oleh jaksa penuntut umum :

1. Mengumpulkan Bukti Elektronik (Digital Evidence)

Jaksa akan mengumpulkan bukti dari perangkat elektronik yang digunakan untuk melakukan perjudian, seperti komputer, ponsel, dan server. Ini bisa meliputi bukti transaksi online, jejak digital, chat logs, atau bukti pembayaran yang terkait dengan situs judi online. Bukti-bukti ini penting untuk menunjukkan bahwa aktivitas perjudian memang terjadi secara nyata dan dilakukan oleh terdakwa.

2. Saksi Ahli dalam Bidang Teknologi Informasi

Dalam kasus perjudian online, bukti digital yang disita perlu dianalisis oleh ahli teknologi informasi atau forensik digital untuk memastikan bahwa perangkat atau situs yang digunakan memang terkait dengan tindak pidana perjudian. Jaksa akan memanfaatkan saksi ahli untuk memberikan keterangan yang dapat menguatkan argumen mereka.

3. Penyidikan terhadap Server dan Penyedia Platform Perjudian

Jaksa penuntut umum juga bisa bekerja sama dengan pihak berwenang lainnya untuk melacak server atau platform yang digunakan untuk perjudian online, baik yang beroperasi di dalam negeri maupun luar negeri. Penuntut dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum internasional untuk mengungkap jaringan perjudian online yang melibatkan server di luar negeri.

4. Menyajikan Bukti Transaksi Keuangan

Dalam banyak kasus perjudian online, transaksi finansial menjadi bukti penting. Jaksa bisa melibatkan bukti transaksi melalui bank atau sistem pembayaran online yang menunjukkan adanya aliran uang yang terkait dengan taruhan atau pembayaran kemenangan. Hal ini bisa memperkuat argumen bahwa ada perjudian yang menghasilkan keuntungan finansial.

5. Penyelidikan Terhadap Jaringan Pengelola dan Penyedia Layanan

Jaksa juga dapat melakukan penyelidikan terhadap individu atau pihak yang mengelola situs atau aplikasi perjudian online. Penyidikan terhadap pemilik atau operator situs tersebut bisa memperkuat dakwaan terhadap terdakwa, terutama jika terdakwa terlibat dalam penyediaan atau pengelolaan situs judi online.

6. Penyidikan terhadap Aliran Uang dan Aset Terkait

Jaksa bisa melakukan penyelidikan terhadap aliran uang yang terlibat dalam perjudian online, termasuk mengecek rekening bank, dompet digital, atau aset lain yang digunakan dalam transaksi perjudian. Hal ini berguna untuk membuktikan adanya kerugian atau keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan perjudian tersebut.

7. Keterlibatan dengan Pihak Lain

Jaksa penuntut umum dapat meminta keterangan dengan pihak lain seperti aparat kepolisian, masyarakat, atau pihak-pihak lain yang menyaksikan langsung telah terjadi judi online.

Tantangan Yang dihadapi Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuktian Tindak Pidana Judi Online

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadapi berbagai tantangan dalam penuntutan kasus tindak pidana judi online. Dalam konteks ini, strategi yang diterapkan JPU sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku dapat diadili secara efektif dan memberikan efek jera

kepada masyarakat, berikut beberapa tantangan hukum yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum :

1. Beban pembuktian yang tinggi

Jaksa Penuntut Umum membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana perjudian dengan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Ini menjadi tantangan karena bukti elektronik seringkali dapat diubah atau dipalsukan. Dalam hal ini perlu teknis yang jeli dengan mencari tahu unsur dari tindak pidana tersebut.

a. Unsur subjektif, dalam perjudian secara online merujuk pada elemen yang terkait dengan subjek hukum. Dalam konteks perjudian online, unsur-unsur subjektif tersebut meliputi:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

b. Unsur objektif, dalam perjudian secara online merujuk pada elemen yang berkaitan dengan tindakan itu sendiri. Dalam konteks perjudian online, unsur-unsur objektif tersebut meliputi:

1. Mendistribusikan
2. Mentransmisikan
3. Membuat Dapat Diaksesnya
4. Informasi atau dokumen elektronik
5. Muatan Perjudian

2. Kompleksitas Kasus

Judi online seringkali melibatkan jaringan internasional dan teknologi canggih, sehingga menentukan lokasi dan waktu kejadian (*locus* dan *tempus delicti*) menjadi rumit. JPU perlu melakukan analisis mendalam untuk mengatasi masalah ini dengan teknik jika pelaku telah ditangkap oleh aparat penegak hukum, pemeriksaan dapat dilakukan terhadap media komputer, telepon, serta rekening milik tersangka yang terlibat dalam perjudian secara online. Aparat penegak hukum dapat melakukan imaging pada komputer yang diduga digunakan untuk perjudian secara online, guna mencari bukti bahwa komputer tersebut telah diakses untuk mengunjungi situs perjudian secara berulang kali. Dari hasil imaging, dapat diketahui dengan tepat lokasi pelaku melakukan tindak pidana perjudian dan waktu terjadinya tindakan tersebut, baik melalui alamat IP pengguna maupun informasi yang diperoleh dari log komputer tersebut. Hal ini bertujuan untuk memudahkan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak.

3. Penangkapan dan Hukuman bagi Pelaku Perjudian Online

Tindak pidana perjudian online semakin meluas di masyarakat dan telah mengakar, sehingga memerlukan penanganan khusus. Upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib antara lain meliputi peningkatan edukasi dan kesadaran publik mengenai bahaya serta konsekuensi hukum dari judi online, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyerahkan diri dan mengikuti program rehabilitasi, serta menerapkan kebijakan penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera kepada para pelaku.

Mengatasi fenomena perjudian online di Indonesia adalah tugas yang kompleks dan memerlukan strategi terpadu, mengingat berbagai kendala yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah peralihan dari perjudian konvensional ke bentuk digital atau modern. Dalam pergeseran ini, perjudian tidak lagi terbatas pada aspek fisik, melainkan telah memasuki ranah digital yang memerlukan pendekatan penegakan hukum yang berbeda dan lebih canggih. Beberapa hambatan dalam proses penanggulangan tindak pidana ini meliputi keterbatasan di bidang teknologi informasi (IT), sehingga penerapan hukum lebih

terfokus pada Pasal 303 KUHP yang mengatur perjudian secara umum.

setiap upaya hukum yang dilakukan memiliki dualisme dalam penerapannya, di mana hukum berlaku tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi individu dalam lembaga penegak hukum. Hal ini penting agar mereka tetap bersikap tegas dalam menindak segala bentuk kriminalitas perjudian online. Strategi Jaksa Penuntut Umum dalam menghadapi tantangan hukum terkait tindak pidana judi online meliputi penerapan hukum maksimal, kolaborasi dengan lembaga lain, serta pemanfaatan bukti digital secara efektif.

KESIMPULAN

Strategi jaksa penuntut umum dalam mengungkap tindak pidana perjudian online di Indonesia sangat penting mengingat kompleksitas dan perkembangan pesat yang terjadi di bidang ini. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum, khususnya terkait dengan perjudian yang kini beralih ke ranah digital. JPU dihadapkan pada berbagai hambatan, mulai dari beban pembuktian yang tinggi hingga kompleksitas kasus yang sering melibatkan jaringan internasional dan teknologi canggih.

Dalam menghadapi tantangan ini, JPU menerapkan strategi yang meliputi pengumpulan dan analisis bukti yang efektif, baik melalui alat bukti elektronik maupun investigasi mendalam terhadap perangkat yang digunakan pelaku. Kerjasama dengan lembaga lain dan penggunaan teknologi forensik juga menjadi bagian penting dari pendekatan ini. Dengan memahami unsur-unsur subjektif dan objektif dalam perjudian online, JPU dapat memastikan bahwa semua elemen hukum terpenuhi dalam setiap kasus.

Demi perlindungan masyarakat dan penegakan hukum yang tegas, penting bagi JPU untuk terus mengembangkan metode dan strategi yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Upaya maksimal dalam penanganan kasus perjudian online tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada edukasi dan rehabilitasi bagi pelaku, sehingga dapat menciptakan efek jera yang lebih luas dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asaad, A. F. J., Bachri, S., & Ilmar, A. (2023). Efektivitas hukum alat bukti elektronik dalam Efridadewi. (2020). Modul hukum pidana. Tanjung Pinang: Umrah Press.
- Haryono, G. (2024, September 24). Wawancara dengan koordinator tindak pidana umum Kejati.
- Handayani, S. A. (2020). UAS forensika digital. Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Lancang Kuning.
- Harahap, M. Y. (2008). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (edisi kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2012). Teori dan hukum pembuktian. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Judi. Diakses 17 Oktober 2024, dari <https://kbbi.web.id/judi.html>
- pemeriksaan bukti di pengadilan tata usaha negara. *USM Law Review*, 6(1)
- Pratama, M. A. (2017). Eksistensi hasil uji forensik digital dalam sistem pembuktian perkara pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2.
- Papada, A. T., Karim, M. S., & Heryani, W. (2020). Kedudukan alat bukti yang diperoleh melalui teknologi informasi dalam pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7(1).